

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Pendukung Keputusan (DSS)

Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi spesifik yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat (Kusumadewi, 2010 : 1) :

- a. Terstruktur, yaitu : berhubungan dengan persoalan yang telah diketahui sebelumnya dengan penyelesaian standar aturan yang telah ditentukan.
- b. Semi terstruktur, yaitu : berhubungan dengan persoalan yang belum diketahui sebelumnya, dengan parameter yang sudah ada.
- c. Tidak terstruktur yaitu : berhubungan dengan persoalan baru yang cukup pelik, karena banyaknya data yang belum diketahui.

2.1.1 Tujuan Sistem Pendukung Keputusan

Tujuan sistem pendukung keputusan menurut (Kusrini, M.Kom. : 2010) adalah :

- a. Membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah yang sepenuhnya terstruktur dan tidak terstruktur.
- b. Mendukung penilaian manajer bukan menggantikannya.
- c. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer terhadap suatu pemecahan masalah.

Proses pengambilan keputusan seefisien mungkin, juga terdapat manfaat utamanya adalah terdapat hasil keputusan yang lebih baik.

2.1.2 Tahapan Proses Pengambilan Keputusan

Tahap – tahap dalam proses pengambilan keputusan yaitu : (Turban, 2005 : 3) :

a. Tahap Penelusuran (Intellegence)

Tahap ini merupakan proses penelusuran, pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data yang diperoleh diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah.

b. Tahap Perancangan (Design)

Tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin dilakukan. Hal ini meliputi pemahaman terhadap masalah dan menguji solusi yang layak.

c. Tahap Pemilihan (Choice)

Pada tahap ini dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil suatu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu.

d. Tahap Implementasi (Implementation)

Pada tahap ini dibuat suatu solusi yang direkomendasikan dapat bekerja atau implementasi yang diusulkan untuk suatu masalah.

2.2 Program Keluarga Harapan (PKH)

Tinjauan tentang program keluarga harapan bersumber dari dokumen-dokumen resmi kementerian RI yang meliputi pedoman PKH tahun : 2015, 2016, 2017.

2.2.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan panduan umum program keluarga harapan 2017 adalah : program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dalam istilah internasional dikenal dengan nama : *Conditional Cash Transfer (CCT)*.

2.2.2 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun tujuan dari program bantuan PKH adalah :

- a. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan kemandirian perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan.

2.2.3 Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun kriteria keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan PKH pada tahun 2017 ini mengalami 1 peningkatan kriteria, jika pada tahun sebelumnya hanya ada 5 kriteria maka pada tahun 2017 ini terdapat 6 kriteria. Berikut 6 kriteria penerima bantuan PKH serta kewajibanya :

Tabel 2.1 Kriteria dan Kewajiban Penerima Bantuan PKH

NO	KRITERIA	USIA	KEWAJIBAN
1.	Ibu Hamil/ Nifas	-	Pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak 4x dalam 3x trimester.
2.	Bayi	Usia 0 – 11 Bulan	Imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan
		Usia 6 – 11 Bulan	Mendapat suplemen vitamin A
3.	Balita	Usia 1 – 5 Tahun	Imunisasi tambahan dan pemeriksaan tambahan setiap bulan
		Usia 5 – 6 Tahun	Pemeriksaan berat badan setiap 1 bulan dan mendapatkan vitamin A sebanyak 2x dalam setahun
		Usia 6 – 7 Tahun	Timbang badan di faskes
4.	Anak Sekolah	Usia 6 – 21 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD,SMP, SLTA)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdaftar disekolah/ pendidikan kesetaraan ✓ Minimal 85% kehadiran dikelas
5.	Penyandang Disabilitas Berat	-	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan ✓ Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan kerumah (Home Care)
6.	Lansia Miskin	70 +	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia) ✓ Mengikuti kegiatan sosial (Day Care dan Home Care)

2.2.4 Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Penyaluran bantuan adalah penyaluran dana bantuan penerima PKH yang disalurkan dari rekening pemberi bantuan sosial ke rekening penerima bantuan sosial. Adapun proses penyalurannya adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan PKH berupa uang
- b. Disalurkan 4 tahap dalam 1 tahun
- c. Nilai bantuan sama per keluarga (*Flat Benefit*)
- d. Mekanisme tunai dan non tunai

2.2.5 Mekanisme Pendataan Calon Penerima PKH

Data penerima PKH didapatkan Kementerian Sosial berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh dari hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) dan diberikan Ke Dinas Sosial masing-masing Kabupaten kota. Kemudian data tersebut akan di cek/validasi oleh pendamping PKH jika sesuai akan dianggap eligible (berhak mendapatkan bantuan) jika tidak sesuai maka akan dianggap non eligible (tidak mendapatkan bantuan).

2.2.6 Besaran Manfaat dari Banyak Variasi Komponen PKH

Tabel 2.2 Besaran Manfaat dari Banyak Variasi Komponen PKH

NO	KOMPONEN BANTUAN	INDEKS BANTUAN (Rp/Tahun/Keluarga)
1.	KPM Reguler	1.890.000,-
2.	KPM Lanjut Usia	2.000.000,-
3.	KPM Penyandang Disabilitas	2.000.000,-
4.	KPM Di Papua dan Papua Barat	2.000.000,-

2.3 Analytical Hierarchy Process (AHP)

Metode **Analytical Hierarchy Process (AHP)** merupakan salah satu model pengambilan keputusan untuk membantu kerangka berfikir manusia. Metode ini

pertama dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 70-an. Dasar berfikirnya metode **Analytical Hierarchy Process (AHP)** adalah proses untuk membentuk skor secara numeric untuk menyusun ranking setiap alternatif keputusan berbasis pada bagaimana sebaiknya alternatif itu dicocokkan dengan kriteria pembuat keputusan.

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan salah satu metode untuk membantu untuk menyusun suatu prioritas dari berbagai pilihan dengan menggunakan kriteria. Karena sifatnya yang multikriteria, **Analytical Hierarchy Process (AHP)** cukup banyak digunakan dalam penyusunan prioritas. Sebagai contoh untuk menyusun prioritas penelitian, pihak manajemen lembaga penelitian sering menggunakan beberapa kriteria seperti : dampak penelitian, biaya, kemampuan SDM, dan waktu pelaksanaan.

2.3.1 Kelebihan Metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*

Kelebihan dari model AHP adalah kemampuannya dalam memecahkan masalah multiobjectives dan multikriteria. Fleksibilitasnya tinggi dalam pembuatan hierarki sehingga membuat model AHP ini dapat menangkap beberapa tujuan dan beberapa kriteria sekaligus dalam sebuah model atau dalam sebuah hierarki.

2.3.2 Kekurangan Metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*

Model *Analytical Hierarchy Process (AHP)* ini juga memiliki beberapa kelemahan. Ketergantungan model ini terhadap input beberapa persepsi seorang ahli akan membuat hasil akhir dari model ini menjadi tidak ada artinya apabila penilaian yg

diberikan keliru. Kebanyakan orang bertanya apakah persepsi dari seorang ahli tersebut dapat mewakili kepentingan orang banyak atau tidak.

Keraguan seperti ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda dengan orang lain. Untuk itu harus diberikan batasan tegas dari seorang ahli untuk meyakinkan masyarakat bahwa persepsi si ahli dapat mewakili pendapat masyarakat atau paling tidak sebagian besar masyarakat.

2.3.3 Langkah-langkah Metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*

Menurut (Kusrini, 2007:135), langkah-langkah dalam metode AHP meliputi :

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan
2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan menetapkan tujuan umum, yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas.
3. Membuat prioritas elemen :
 - a. Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat perbandingan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan.
 - b. Matrik perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen yang lain.

4. Sintesis

Adalah pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan, untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Langkah-langkah ini adalah :

- a. Menjumlahkan nilai dari setiap kolom pada matriks

- b. Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks.
 - c. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai prioritas.
5. Mengukur konsistensi

Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah :

- a. Kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relative elemen pertama, dan nilai pada kolom kedua dengan prioritas relative elemen kedua dan seterusnya.
 - b. Jumlahkan setiap baris.
 - c. Hasil penjumlahan tiap baris dibagi prioritas bersangkutan dan hasilnya dijumlahkan.
6. Mencari Nilai Consistency Index (CI)

$$CI = (\lambda_{\text{maks}} - n) / (n - 1)$$

Keterangan :

CI = *Consistency Indeks*

λ_{maks} = *eigenvalue maksimum*

n = Banyaknya elemen

7. Mencari nilai *Consistency Ratio* (CR)

$$CR = CI / RI$$

Keterangan :

CR = *Consistency Ratio*

CI = *Consistency Indeks*

RI = *Random Indeks*

8. Memeriksa konsistensi hirarki, yang diukur adalah rasio konsistensi dengan melihat indeks konsistensi. Jika nilai Consistency Ratio $> 0,1$ maka penilaian data judgment harus diperbaiki. mengulangi langkah 3, 4 dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki. Jika Consistency Ratio $< 0,1$ maka nilai perbandingan berpasangan pada matriks kriteria yang diberikan konsisten.